

# 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0 memberikan berbagai kemudahan yang mendorong pertumbuhan kapasitas produksi dan penjualan bagi dunia industri, salah satunya adalah industri otomotif. Hal ini ditandai dengan meningkatnya populasi kendaraan bermotor dari waktu ke waktu. Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun 2018 telah mencapai 146.858.759 unit. Sebanyak 120.101.047 unit adalah sepeda motor, sedangkan 26.757.712 unit lainnya adalah mobil yang terdiri dari mobil bis, mobil barang, dan mobil penumpang (BPS 2018). Melihat populasi kendaraan bermotor yang terus bertambah setiap tahunnya, pemenuhan atas kebutuhan *aftersales* pada penyedia layanan purnajual (bengkel) pun semakin meningkat, seperti perawatan berkala, perbaikan dan cat, pencucian kendaraan, pemakaian bahan, hingga penggantian suku cadang.

Suku cadang (*spare part*) merupakan komponen dari sebuah kendaraan yang saling berpadu dan memiliki fungsi yang berbeda satu sama lain. Setiap suku cadang yang terpasang di dalam kendaraan pun memiliki ketahanan dan masa pakai yang berbeda, sehingga perlu dilakukan penggantian oleh perusahaan penyedia layanan purnajual baik secara berkala maupun pada kondisi tertentu agar performa kendaraan tetap prima dan bebas dari kerusakan. Dalam melakukan penggantian suku cadang kendaraan, perusahaan penyedia layanan purnajual memerlukan aset untuk dapat menunjang kegiatannya, seperti mesin, peralatan, dan persediaan.

Persediaan merupakan salah satu aset penting yang harus dimiliki oleh perusahaan. Persediaan menjadi penting karena sebagian besar pendapatan yang diperoleh suatu perusahaan bersumber dari persediaan, apapun bidang usahanya. Bagi perusahaan jasa, persediaan digunakan untuk pemakaian internal dan pemberian jasa kepada pelanggan. Bagi perusahaan dagang, persediaan dibeli untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk atas persediaan itu sendiri, sedangkan bagi perusahaan manufaktur persediaan digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan produk jadi. Jumlahnya yang banyak dan relatif besar membuat persediaan harus dikelola dengan baik dan membutuhkan perlakuan akuntansi yang tepat agar tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Mulai dari pengakuan, pengukuran, pencatatan, penilaian, hingga penyajian persediaan suatu entitas yang memiliki akuntabilitas publik di Indonesia harus sesuai dengan pedoman yang berlaku, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 14 tentang Persediaan. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik di Indonesia di antaranya adalah PT Astra International, Tbk (PT AI). Salah satu unit bisnis PT AI dalam segmen usaha otomotif adalah PT Astra International, Tbk – Daihatsu *Sales Operation* (PT AI-DSO) Cabang Bogor Yasmin.

PT AI-DSO Cabang Bogor Yasmin bergerak di bidang usaha penjualan mobil bermerek Daihatsu serta menyediakan layanan purnajual yang mencakup



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

servis, perbaikan *body* kendaraan, dan penggantian suku cadang. Sesuai dengan bidang usahanya, PT AI-DSO Cabang Bogor Yasmin memiliki persediaan yang beragam, yaitu persediaan unit mobil, persediaan perlengkapan alat tulis kerja (ATK), persediaan bahan, dan persediaan suku cadang. Masing-masing persediaan tersebut dimiliki untuk tujuan penggunaan yang berbeda. Persediaan unit mobil ditujukan untuk dijual kepada pelanggan, persediaan ATK ditujukan untuk pemakaian internal oleh para pegawai, persediaan bahan ditujukan untuk pemberian jasa servis, sedangkan persediaan suku cadang ditujukan untuk dijual langsung kepada pelanggan atau digunakan dalam pemberian jasa servis dan perbaikan *body* kendaraan. Cara pembebanan suku cadang pada PT AI-DSO Cabang Bogor Yasmin sering menimbulkan selisih perhitungan antara persediaan secara fisik dengan persediaan yang tersaji dalam catatan pembukuan. Apabila hal itu terus-menerus terjadi, perusahaan akan mengalami kerugian yang cukup besar karena nilai jual dan permintaan suku cadang pada PT AI-DSO Cabang Bogor Yasmin cenderung meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih lanjut dengan mengambil topik laporan akhir yang berjudul “**Perlakuan Akuntansi atas Persediaan Suku Cadang pada PT AI-DSO Cabang Bogor Yasmin**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berikut permasalahan dasar yang dirumuskan terkait topik laporan akhir ini:

1. Bagaimana prosedur permintaan persediaan suku cadang pada PT AI-DSO Cabang Bogor Yasmin?
2. Bagaimana prosedur penerimaan persediaan suku cadang pada PT AI-DSO Cabang Bogor Yasmin?
3. Bagaimana prosedur pengeluaran persediaan suku cadang pada PT AI-DSO Cabang Bogor Yasmin?
4. Bagaimana pengakuan, pengukuran, pencatatan, penilaian, dan penyajian persediaan suku cadang pada PT AI-DSO Cabang Bogor Yasmin?
5. Bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi persediaan suku cadang pada PT AI-DSO Cabang Bogor Yasmin dengan PSAK Nomor 14 tentang Persediaan?

## 1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan laporan akhir ini adalah:

1. Menguraikan prosedur permintaan persediaan suku cadang pada PT AI-DSO Cabang Bogor Yasmin.
2. Menguraikan prosedur penerimaan persediaan suku cadang pada PT AI-DSO Cabang Bogor Yasmin.
3. Menguraikan prosedur pengeluaran persediaan suku cadang pada PT AI-DSO Cabang Bogor Yasmin.
4. Menguraikan pengakuan, pengukuran, pencatatan, penilaian, dan penyajian persediaan suku cadang pada PT AI-DSO Cabang Bogor Yasmin.

5. Menguraikan evaluasi kesesuaian perlakuan akuntansi persediaan suku cadang pada PT AI-DSO Cabang Bogor Yasmin dengan PSAK Nomor 14 tentang Persediaan.

#### 1.4 Manfaat

Laporan akhir ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menambah wawasan bagi penulis terkait perlakuan akuntansi persediaan yang terjadi di PT AI-DSO Cabang Bogor Yasmin.
2. Dapat memberikan informasi tambahan bagi pembaca sebagai referensi dalam melakukan pengkajian yang sama di masa yang akan datang.
3. Sebagai bahan masukan bagi perusahaan mengenai perlakuan akuntansi persediaan yang tepat agar sesuai dengan PSAK Nomor 14 tentang Persediaan.

## 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Definisi Akuntansi

Akuntansi dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang pemakai jasa akuntansi dan proses kegiatannya (Jusup 2011:4). Ditinjau dari sudut pemakai, akuntansi merupakan suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan suatu entitas. Apabila ditinjau dari sudut kegiatan, akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu entitas. Akuntansi disebut juga sebagai *bussines language* atau bahasa bisnis yang merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan informasi keuangan perusahaan bagi para pengambil keputusan. Berikut definisi akuntansi menurut beberapa ahli lainnya:

*Statement of the Accounting Principle Board 4* mendefinisikan “Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan data kuantitatif terutama yang mempunyai sifat keuangan, dari suatu kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dalam memilih alternatif-alternatif dari suatu keadaan” (Baridwan 2014:1).

*American Accounting Association* mendefinisikan “Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut” (Sadeli 2011:2).

Kieso *et al.* mendefinisikan “Akuntansi sebagai suatu sistem dengan *input* data [atau] informasi dan *output* berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun eksternal entitas” (Martani *et al.* 2018:4).

